

IMPLIKASI KEBIJAKAN PERUBAHAN STATUS KAWASAN TAMAN WISATA ALAM KE AREAL PENGGUNAAN LAIN DI KAMPUNG JENGGALU KITO KOTA BENGKULU

Agustri Hestiana¹, Faridah¹, Romdana³
123 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu
Email : romdana@stiabengkulu.ac.id

Received: 05-03-2024

Revised: 15-03-2024

Approved: 25-04-2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja tindakan dari aktor langsung (Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kota Bengkulu) maupun tidak langsung terhadap perubahan status kawasan wisata Perubahan atau peralihan fungsi hutan taman wisata alam merupakan salah satu bagian dari pengelolaan hutan. Hal ini pula yang terjadi di Kampung Jenggalu Kito yakni perubahan dari Taman Wisata Alam menjadi kawasan Areal Penggunaan Lain. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yakni melalui proses wawancara mendalam (indepht interview) kepada beberapa informasi serta dari sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perubahan status Taman Wisata Alam memberikan dua implikasi penting. Pertama, aktor langsung yang memanfaatkan adanya kebijakan sebagai bagian dari pemenuhan kepentingan pribadi atau menjadi penumpang gelap akan kebijakan tersebut. Kedua, aktor tidak langsung yang ikut berperan penting terhadap perubahan tersebut karena memberikan pula peningkatan ekonomi dan kesejahteraan hidup masyarakat Kampung Jenggalu Kito. Akan tetapi, peningkatan ditingkat ekonomi tentu tak akan selalu memberikan implikasi yang baik secara jangka panjang terhadap lingkungan akibat adanya perubahan status Taman Wisata Alam dan pengembangan objek wisata.

Kata Kunci: *Politik Lingkungan, Kebijakan, Aktor Langsung dan Aktor Tidak Langsung*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara besar, yang mengalokasikan 120,6 juta hektar atau sekitar 63 persen dari luas daratannya sebagai Kawasan Hutan. Sedangkan kawasan daratan sisanya berupa areal bukan kawasan hutan yang dikenal sebagai Areal Penggunaan Lain (APL). Kawasan Hutan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) fungsi, yaitu: Hutan Produksi (HP) meliputi areal seluas 68,8 juta hektar atau 57 persen dari Kawasan Hutan; Hutan Konservasi (HK) meliputi areal seluas 22,1 juta hektar atau 18 persen dari Kawasan Hutan (dengan tambahan 5,3 juta hektar dari kawasan konservasi perairan); dan Hutan Lindung yang memiliki fungsi perlindungan daerah aliran sungai (DAS) dan meliputi areal seluas 29,7 juta hektar atau 25 persen (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018). Indonesia yang beriklim tropis, telah dianugerahi lebih dari 17.000 buah pulau yang terletak di antara 2 (dua) benua, Asia dan Australia, dan di antara 2 (dua) samudera, Samudera Pasifik dan Samudera India. Hal ini disebabkan oleh lokasi geograis Indonesia

yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati dan endemisitas sangat tinggi, dan memiliki potensi tingkat keanekaragaman hayati lebih besar dari beberapa negara lain di dunia.

Lebih lanjut, berdirinya pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto merupakan suatu jalan baru dalam memulai kebangkitan bangsa setelah keadaan yang tak menentu di akhir masa Orde Lama. Sejak menjabat pada tahun 1966, Soeharto menganut paradigma 'pertumbuhan ekonomi'. ia memacu berbagai sektor seperti minyak bumi, kehutanan, pertambangan, perkebunan, pertanian, sebagai prioritas program pembangunan rezim Orde Baru, dan sangat berbeda dengan rezim Orde Lama, di mana politik sebagai panglima yang lebih besar (Garuda Nusantara dalam Hidayat, 2011:31). Berbagai kebijakan dikeluarkan dalam menjalankan misi pembangunan ekonomi tersebut. Misalnya, dalam pembangunan sektor kehutanan, pemerintah melancarkan kebijakan dengan memperbolehkan sektor swasta untuk menebang dan mengeksport log (kayu bulat). Hal ini kemudian memberikan dampak yang tidak terduga selama perjalanannya.

Di era reformasi, dengan adanya desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sendiri daerahnya. Hal ini tentu membuka peluang bagi terselenggaranya percepatan kesejahteraan masyarakat yang lebih efisien dan efektif. Misalnya saja dengan pengelolaan sumber daya alam di daerah yang dapat lebih mudah dijalankan. Akan tetapi, seiring berjalannya desentralisasi kemudian tak selalu memberikan dampak positif. Dengan terbukanya kewenangan daerah yang dapat mengatur sendiri 3 kebutuhannya sering disalahgunakan. Seperti halnya dalam pengelolaan hutan yang merupakan rahmat yang besar diberikan kepada Indonesia. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK, hasil pemantauan hutan Indonesia Tahun 2019, menunjukkan luas lahan berhutan seluruh daratan Indonesia adalah 94,1 juta ha atau 50,1% dari total daratan, 92,3% dari total luas berhutan atau 86,9 juta ha berada di dalam kawasan hutan (ppid.menlhk.go.id).

Rahmadi (2016) memaparkan berdasarkan status penguasaannya, hutan dapat dibedakan atas hutan negara dan hutan hak. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak. Dimana, pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyusun strategi pengurusan hutan karena hutan di dalam wilayah Republik Indonesia dikuasai oleh negara. Hak menguasai negara ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan pengurusan hutan, antara lain meliputi : perencanaan, pengelolaan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan serta pengawasan. Kini pemanfaatan hutan dilakukan dengan berbagai mekanisme mulai dari mengizinkan hutan untuk dikelola oleh pihak swasta, meningkatkan hutan produksi bahkan peralihan fungsi hutan itu sendiri. Selain itu, 4 bentuk pemanfaatan yang kini dilakukan berupa perhutanan sosial yang memiliki beberapa pola atau skema yakni diantaranya hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan adat.

Pemanfaatan hutan telah diatur dalam berbagai aturan yang dikeluarkan oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan. UU No. 41/1999 dan PP No. 34/2002 menyebutkan pula bahwa bentuk pemanfaatan hutan lindung terbatas pada pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dapat berupa budidaya tanaman obat,

perlebahan, penangkaran. Sedangkan pemanfaatan jasa lingkungan adalah bentuk usaha yang memanfaatkan potensi hutan lindung dengan tidak merusak lingkungan seperti ekowisata, wisata olah raga tantangan, pemanfaatan air, dan perdagangan karbon. Bentuk-bentuk pemanfaatan ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah, peningkatan kesejahteraan dan kesadaran masyarakat sekitar hutan akan fungsi dan kelestarian hutan lindung. Selain itu, berbagai faktor dapat menyebabkan adanya perubahan terhadap hutan itu sendiri, misalnya adanya peralihan fungsi hutan. Peralihan fungsi hutan lindung merupakan bagian dari pengelolaan kawasan hutan lindung.

Disebutkan bahwa peralihan fungsi hutan lindung itu sendiri dapat terjadi jika ada perubahan dalam fungsinya sebagai penyangga kehidupan, adanya permukiman, adanya bentuk kegiatan persawahan, dan sejenisnya. Namun, pemanfaatan dalam hutan lindung dapat pula dilakukan dengan menggunakan jasa lingkungan yang telah disebut diawal. Jasa lingkungan yang dapat dilakukan yakni pemanfaatan tempat wisata. Ketika pembangunan ekonomi yang kemudian menjadi prioritas, pembangunan dalam sektor pariwisata menjadi alternatif yang mapan khususnya yang berada dalam kawasan hutan lindung. Pemanfaatan tersebut tentu mengikuti aturan yang berlaku dan tidak boleh melewati batas. Pemanfaatan kawasan Taman Wisata Alam Pulau Baai, dengan bentuk tempat wisata telah banyak dimanfaatkan. Salah satunya di Kampung Jenggalu Kito, Kota Bengkulu sebagai salah satu daerah yang berada dibagian Barat Daya Pulau Sumatera dan berada di pantai barat bagian Selatan Pulau Sumatera yang berhadapan langsung dengan garis pantai Samudera Hindia di sisi barat provinsi tersebut. Dengan luas wilayah yang hanya sebesar 19.919,33 km², Provinsi Bengkulu merupakan provinsi terkecil urutan pertama di daratan Pulau Sumatera dan provinsi terkecil urutan kesepuluh di Indonesia.

Terkait kegiatan pariwisata di Kampung Jenggalu Kito yang begitu indah masih memberikan kekhawatiran atas pemanfaatannya. Lokasinya yang strategis dengan berbagai pilihan pemanfaatan nampaknya menjadi pemicu beragamnya stakeholders untuk memanfaatkan kawasan ini. Tak luput pula pemanfaatan wilayah dengan pendirian Dermaga atau Saung Terapung wisata sebagai pendukung daya tarik pengunjung kian banyak. Hal ini pula lah yang memberikan ruang kepada free rider yang ada dalam pengembangan Objek Wisata Kampung Jenggalu Kito sekaligus atas perubahan status Taman Wisata Alam menjadi Area Penggunaan Lain di Kampung Jenggalu Kito.

Setelah dikeluarkannya SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NOMOR SK.533/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2023 tanggal 25 Mei 2023 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan, dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan di Provinsi Bengkulu. Perubahan dari Taman Wisata Alam tersebut tentu memberikan jalan terbuka bagi tempat wisata untuk terus dikembangkan tanpa terhalang oleh aturan kehutanan karena statusnya. Isu lingkungan dan kekuasaan terkait pengelolaannya telah memunculkan berbagai pandangan salah satunya politik lingkungan.

Politik lingkungan dalam banyak negara di dunia mempunyai peran penting tidak hanya pada tingkatan yang berbeda, tetapi juga dalam bingkai kerja struktural yang berbeda. Dalam salah satu kajian politik lingkungan, ada dua aktor yang menjadi pelaku dalam pengelolaan hutan di Indonesia yakni aktor langsung (negara dan swasta) dan aktor tidak langsung (masyarakat lokal, LSM, lembaga keuangan). 7 Peran dari para stakeholder

tentu memberikan kontribusi terhadap peralihan fungsi hutan menjadi kawasan wisata di Kampung Jenggalu Kito, baik itu para aktor atau pelaku langsung maupun tidak langsung yang memberikan pengaruh terhadap kebijakan maupun tindakan yang diambil.

Keputusan-keputusan tersebut tentu memiliki dampak terhadap sumber daya hutan maupun kehidupan sosial ekonomi masyarakat lokal yang tinggal di dalam Pesisir Pantai sebelumnya. tak hanya itu, kepentingan tersendiri bagi para stakeholder yang terlibat. Berdasarkan hal tersebut, dalam tulisan ini penulis memaparkan bagaimana perubahan status dari Taman Wisata Alan menjadi kawasan Area Penggunaan Lain di Kampung Jenggalu Kito, Kelurahan Lingkar Barat, Kota Bengkulu berdasarkan perspektif politik lingkungan.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka atau *literature review* adalah bahan yang tertulis berupa buku, jurnal yang membahas tentang topik yang hendak diteliti. Tinjauan pustaka membantu peneliti untuk melihat ide-ide, pendapat, dan kritik tentang topik tersebut yang sebelumnya dibangun dan dianalisis oleh para ilmuwan sebelumnya. Pentingnya tinjauan pustaka untuk melihat dan menganalisa nilai tambah penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya (Raco, 2010:104).

Implikasi Kebijakan

Menurut Islamy (2003, 114-115) menjelaskan implikasi merupakan segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu. Sementara itu, Winarno (2002:171-174) menjelaskan setidaknya ada lima dimensi yang harus dibahas dalam memperhitungkan implikasi dari sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi:

1. Implikasi kebijakan pada masalah-masalah publik dan implikasi kebijakan pada orang-orang yang terlibat.
2. Kebijakan mungkin mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan.
3. Kebijakan mungkin akan mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang.
4. Evaluasi juga menyangkut unsur yang lain yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik.
5. Biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.

Lebih lanjut, Silalahi (2005: 43) berpendapat bahwa implikasi adalah sebuah akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan, yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijaksanaan tersebut. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implikasi merupakan suatu akibat yang terjadi atau ditimbulkan pelaksanaan kebijakan atau program tertentu bagi sasaran pelaksanaan program baik yang bersifat baik atau tidak baik.

Konsep Kebijakan Publik

Dua teoritis, Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt sebagaimana dikutip oleh Charles O. Jones dalam Solichin mengatakan bahwa kebijakan itu tak lain adalah berdirinya keputusan ditandai dengan konsistensi perilaku dan berulang yang membuatnya dan orang-orang baik dipihak mereka mematuinya. Versi formal oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan makna pada kebijakan sebagai berikut: “Kebijakan ialah pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgra atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi 15 mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu, atau suatu rencana”.

Menurut Thomas R. Dye (1992) dalam Sahya, “*Public Policy is whatever the government choose to do or not to do* (Kebijakan Publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu)”. Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan “tindakan” pemerintah”. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya

Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Adapun tahap-tahap dari suatu kebijakan publik yang dijelaskan William Dunn dalam Sahya (1995), adalah sebagai berikut.

1. Penyusunan Agenda Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik yang dipertaruhkan.
2. Formulasi kebijakan Masalah yang sudah masuk di agenda kebijakan kemudian dibahas oleh pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut didefinisikan untuk dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau kebijakan yang ada.
3. Adopsi atau legitimasi kebijakan Legitimasi bertujuan memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu.
4. Penilaian atau evaluasi kebijakan Secara umum, evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak (Budi Winarno dalam Sahya, 2008)

Implementasi Kebijakan

Konsep implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster (Wahab dalam Sahya, 2006:64), *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Sedangkan, Van Meter dan Van Horn (Wahab dalam Sahya, 2006:65) menjelaskan implementasi sebagai suatu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Hakikat utama implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier (Widodo dalam Sahya, 2010:87) adalah memahami hal-hal yang seharusnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat. Grindle dalam Sahya (1980) dalam bukunya yang berjudul *Politics and Policy Implementation in the Third World* mengatakan bahwa dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan bergantung pada *content* (isi) dan *contextnya*, serta tingkat keberhasilannya bergantung pada kondisi tiga komponen variabel sumber daya implementasi yang diperlukan.

1. Content of Policy (Isi Kebijakan)

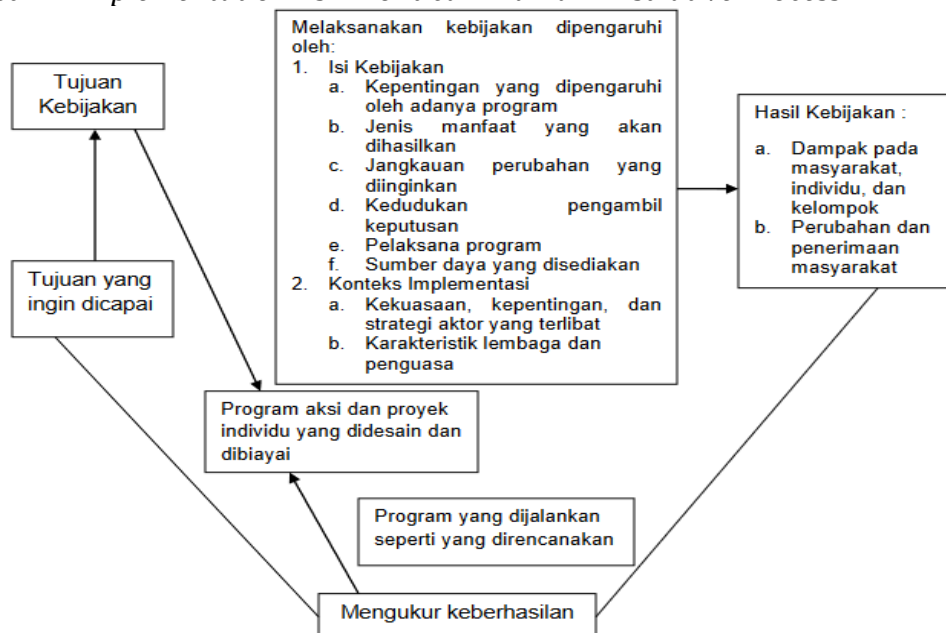
Isi kebijakan atau program akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi. Kebijakan kontroversial, kebijakan yang dipandang tidak populis, kebijakan menghendaki perubahan besar, akan mendapatkan perlawanan baik dari kelompok sasaran, maupun dari implementornya yang merasa sulit melaksanakan kebijakan tersebut atau merasa dirugikan.

2. Context of Implementation (Konteks Implementasi)

Konteks implementasi juga akan berpengaruh pada tingkat keberhasilannya karena baik mudahnya kebijakan maupun dukungan kelompok sasaran, hasil implementasi tetap bergantung pada implementatornya. Karakter dari pelaksana akan mempengaruhi tindakan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan karena pelaksana adalah individu yang tidak mungkin bebas dari kepercayaan, aspirasi, dan kepentingan pribadi yang ingin dicapai.

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, terdapat suatu kemungkinan dari pelaksana untuk membelokkan sesuatu yang sudah ditentukan demi kepentingan pribadinya sehingga dapat menjauhkan tujuan dari kebijakan sebenarnya.

Gambar 1. *Implementation As A Political And Administrative Process*



Sumber: Diadaptasi dari Merilee S. Grindle dalam Sahya (1980)

Telaah Pustaka

Penelitian ini bertumpu pada 3 literatur utama. Dimana ketiga literatur tersebut merupakan dua skripsi dan satu jurnal. Pertama, Eko Aji Wahyudin dalam Skripsinya dengan judul “Gerakan Sosial Baru Dan Politik Lingkungan (Studi Atas Kontribusi WALHI Terhadap Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta 2004-2017)”. Penelitian ini membahas bagaimana kontribusi yang dilakukan oleh salah satu LSM yang bergerak pada aksi lingkungan hidup di Indonesia yakni Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) terhadap Ruang Terbuka Hijau di Jakarta.

Persamaan dari literatur pertama ini dengan penulis yakni menggunakan perspektif dimensi Politik Lingkungan oleh Herman Hidayat serta metode yang digunakan yakni kualitatif yang disajikan secara deskriptif. Perbedaan dari literatur pertama ini terletak pada objek penelitiannya dimana literatur ini membahas kontribusi WALHI sebagai salah satu aktor non formal dalam lingkup politik lingkungan. Sedangkan penulis mengambil kajian aktor langsung dan tidak langsung dalam kaitannya dengan peralihan fungsi Taman Wisata Alam menjadi kawasan Areal Penggunaan Lain. Selain itu, lokasi penelitian pun berbeda dimana literatur ini dilakukan di Jakarta sedang penulis di Kampung Jenggalu Kito, Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu .

Kedua, Muhammad Irfan F. dalam Skripsinya dengan judul “Tinjauan Yuridis Implementasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai Dalam Alih Fungsi Hutan Lindung”. Penelitian ini menemukan bahwa kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Sinjai yang memberikan beberapa instruksi terkait dengan perubahan fungsi kawasan hutan dalam hal ini adalah alih fungsi kawasan hutan, namun dari beberapa kewenangan tersebut dalam alih fungsi hutan tidak sesuai dengan peruntukan fungsi dan kriteria-kriteria dalam pengalih fungsian hutan sesuai dengan Peraturan Menteri kehutan Nomor P.34 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap kondisi hutan di Sinjai. Selain itu, Alih fungsi kawasan hutan terjadi karena beberapa faktor diantaranya kondisi pasar, tekanan penduduk, sarana dan prasarana serta karena kebijakan pemerintah itu sendiri. Persamaan dari literatur kedua dengan penelitian ini berdasar segi substantif ialah sama – sama membahas perubahan atau peralihan fungsi kawasan hutan lindung menjadi peruntukan yang lain. Faktor yang menyebabkannya pun sama yakni karena adanya permukiman warga. Perbedaan literatur kedua dengan penelitian ini adalah sudut pandang dari penulisan yang digunakan dimana literatur kedua ini menggunakan tinjauan yuridis terhadap peralihan fungsi hutan lindung sedangkan penulis melihatnya melalui perspektif politik lingkungan. Lokasi penelitian pun yang berbeda dimana literatur ini bertempat di Kabupaten Sinjai, sedang penelitian ini sendiri dilaksanakan di Kampung Jenggalu Kito, Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu .

Ketiga, Cahyo Seftyono dalam jurnalnya dengan judul “Rawa Pening Dalam Perspektif Politik Lingkungan: Sebuah Kajian Awal”. Penelitian ini hendak membaca secara ringkas bagaimana Rawa Pening dilihat dari kaca mata politik lingkungan. Rawa Pening tidak lagi dilihat hanya sebagai sempadan air, melainkan juga ruang diskursus kebijakan publik yang melibatkan masyarakat, negara dan juga tentunya ekosistem itu sendiri. Oleh karenanya, tulisan ini mendeskripsikan Rawa Pening dalam sudut pandang sains, ilmu sosial, politik ekonomi, hingga politik lingkungan itu sendiri sebagai kajian yang multidisiplin.

Persamaan dari literatur ketiga ini dengan penulis yakni sama-sama menggunakan perspektif politik lingkungan dalam melihat objek penelitian. Metode yang digunakan pun sama yakni metode kualitatif deskriptif. Perbedaan literatur ketiga ini dengan penelitian penulis yakni objek kajian penelitian dimana literatur ini mengangkat rawa pening atau sempadan air sedangkan penulis mengangkat permasalahan Taman Wisata Alam menjadi kawasan Areal Penggunaan Lain. Lokasi pun berbeda dimana literatur ini dilaksanakan di Jawa Tengah sedangkan penulis di Kampung Jenggalu Kito, Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu .

Kerangka Berpikir

Indonesia dikaruniai sumber daya alam yang besar salah satunya hutan. Pengelolaan hutan menjadi sumber kedua terbesar terhadap devisa negara. Oleh sebab itu, beragam kebijakan dibuat demi memenuhi tuntutan ekonomi. Kebijakan tersebut dapat berupa peralihan fungsi kawasan hutan. Peralihan fungsi kawasan hutan sendiri sudah lama dilakukan termasuk perubahan dari hutan lindung. Hutan lindung yang awalnya berfungsi sebagai daerah penyangga ekosistem, serapan air, dan mencegah banjir kini banyak dialihkan karena beberapa faktor.

Peralihan fungsi atau perubahan tersebut didukung pula oleh stakeholder yang terkait. Peralihan fungsi kawasan Taman Wisata Alam menjadi Areal Penggunaan lain pun dilakukan di Kampung Jenggalu Kito sesuai SK menteri LHK No 533 tahun 2023. Oleh karena itu, aktor langsung yakni pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten memiliki peran yang sangat penting terhadap kebijakan yang diambil. Begitu pula aktor tidak langsung yang ada yakni masyarakat lokal yang juga memberikan pengaruh terhadap perubahan tersebut.

Perubahan tersebut tentu semakin mendukung pengembangan dan pembangunan objek wisata yang ada di Kampung Jenggalu Kito. Kondisi Kampung Jenggalu Kito yang strategis dan menjadi salah satu tujuan wisata unggulan, disatu sisi memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar begitu pula dengan pendapatan asli daerah Kota Bengkulu. Namun, tentu dalam perubahan kawasan yang awalnya sebagai penyangga yang berubah menjadi peruntukan lain diluar kondisinya akan memberikan implikasi terhadap lingkungan itu sendiri. Misalnya saja polusi udara dan air akibat adanya kegiatan kepariwisataan di Kampung Jenggalu Kito. Selain itu, adanya kebijakan tersebut memberikan akses yang mudah bagi para aktor yang menjadi free rider yang memiliki motif tersendiri. Pengelolaan hutan yang lestari seharusnya menjadi pedoman bagi para stakeholder (aktor langsung dan aktor tidak langsung) agar keseimbangan antara politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat terlaksana.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Menurut John W. Creswell (2014:5) metode kualitatif membahas suatu rancangan yang digunakan dalam penelitian dengan sampel penelitian, pengumpulan dan prosedur-prosedur perekaman data secara keseluruhan. Penulis pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode deskriptif dengan memanfaatkan wawancara, observasi atau pengamatan dan pemanfaatan dokumen yang penulis peroleh melalui narasumber. Metode deskriptif

menurut Nasution (2003:24) merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengadakan deskripsi untuk memberikan gambaran yang jelas tentang situasi-situasi di lapangan.

Alasan penulis memilih metode kualitatif dengan pendekatan metode deskriptif adalah karena di dalam penelitian deskriptif ini penulis akan mengungkapkan proses kejadian secara mendetail, terstruktur, sistematis dan terkontrol sehingga dengan ini penulis dapat mengetahui bagaimana realitas yang terjadi di lapangan. Penelitian kualitatif deskriptif digunakan penulis untuk mengkaji atau menggambarkan tentang Implikasi Kebijakan Perubahan Status Kawasan Taman wisata Alam Ke Areal Penggunaan Lain di Kampung Jenggalu Kito Kota Bengkulu.

Variabel-variabel Penelitian

Masalah pada penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus, adapun maksud dalam merumuskan masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus yaitu pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi; kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi inklusi-inklusi atau kriteria masuk keluar atau informasi baru yang diperoleh di lapangan sebagaimana di kemukakan Meleong (2004:93-94). Dalam hal ini yang menjadi variabel-variabel penelitian yaitu Implikasi Kebijakan Perubahan Status Kawasan Taman wisata Alam Ke Areal Penggunaan Lain di Kampung Jenggalu Kito Kota Bengkulu.

Teknik Pengambilan sampel

Sampel Penelitian yang peneliti angkat adalah Implikasi Kebijakan Perubahan Status Kawasan Taman wisata Alam Ke Areal Penggunaan Lain di Kampung Jenggalu Kito Kota Bengkulu yang terlibat langsung dalam tahapan pemulihan sebagai informan kunci, dalam hal ini kriteria penelitian yang diangkat oleh peneliti untuk informan kunci yaitu ; Ketua RT; Ketua Kampung Jenggalu Kito; Masyarakat Kampung Jenggalu Kito

Kriteria tersebut dimaksudkan peneliti guna mendapatkan sampel informan yang mengetahui berbagai hal terkait Pengimplikasian dari Perubahan Kebijakan Suatu Kawasan Taman wisata Alam Ke Areal Penggunaan Lain di Kampung Jenggalu Kito Kota Bengkulu. Dimana, peneliti memusatkan kepada 3 Informan kunci, namun peneliti juga akan menambahkan beberapa informan lain agar mendapatkan informasi yang lebih lengkap terkait Implikasi dari Kebijakan Perubahan Status Kawasan Taman wisata Alam Ke Areal Penggunaan Lain Di Kampung Jenggalu Kito Kota Bengkulu.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut John W. Creswell (2009:266) teknik pengumpulan merupakan usaha membatasi penulisan, mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara baik terstruktur maupun tidak, dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha merancang protokol untuk merekam dan mencatat informasi.

Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan proses akhir dalam penelitian kualitatif (Creswell, 2010:34). Teknik atau metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah induktif dengan menggunakan prosedur fenomenologis (Moleong, 2007:50). Teknik dipilih karena penelitian ini akan berawal dari hasil temuan khas yang ada di lapangan yang kemudian diinterpretasikan secara umum.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif untuk menjelaskan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan. Penelitian ini dilakukan saat menyelesaikan proposal ,dan kemudian mendapatkan surat resmi penelitian dari ketua jurusan dan surat izin penelitian dari Ketua Kampung Jenggalu Kito pada tanggal 22 September 2023 . Hasil penelitian ini berdasarkan data dan fakta yang diperoleh dilapangan ,dianalisis dan penulis mendapatkan kesimpulan yang di harapkan dapat menghasilkan solusi yang dibutuhkan terkait masalah yang ada.

Deskripsi Informan

Informan penelitian dipilih berdasarkan purposive sampling dimana informan yang dipilih merupakan orang-orang yang terlibat atau yang memiliki peran penting dan berpengaruh terhadap Pengembangan Kampung Jenggalu Kito Kelurahan Lingkar Barat, Kota Bengkulu. Sehingga data dan fakta yang diperoleh sesuai dengan yang terjadi di lapangan untuk mendapatkan data primer, peneliti melakukan wawancara dengan informan penelitian berjumlah 6 orang , yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.5
Jumlah Informan

No	Informan	Ket	Jumlah
1	Ketua RT	Informan Kunci (Pemerintah Desa)	1
2	KLHK		
2	Ketua RW	Informan (Pemerintah Desa)	1
3	Ketua Kampung Jenggalu Kito	Informan (Organisasi pendukung)	1
4	Masyarakat	Informan (Non Pemerintah)	3
Jumlah Total Informan			6

Hasil Wawancara

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Pemerintah terkait Perubahan Status Kawasan yang langsung berdampak kepada masyarakat Kampung Jenggalu Kito, dimana peneliti telah menyiapkan pedoman pertanyaan bagi pemerintah dan masyarakat . Penelitian ini menggunakan teori menurut Wisnu Hidayat dimana terdapat beberapa aspek , yaitu partisipasi uang, partisipasi tenaga, dan partisipasi pikiran-pikiran atau ide-ide.

Partisipasi Uang

Pada aspek ini yang dilihat adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat. Berikut adalah hasil Wawancara dengan Ketua RT 008 wawancara pada hari Selasa 15 Agustus 2023, beliau menjelaskan:

“Ada beberapa masyarakat yang memberikan kontribusi atau partisipasi berupa uang ,karakteristik masyarakat yang memberikan partisipasi ini secara sukarela biasanya masyarakat yang tergolong masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas. Partisipasi uang atau materi ini sangat diperlukan, karena semua akan berjalan lancar jika adanya partisipasi ini dan sangat mempengaruhi masyarakat untuk ikut serta

dalam kegiatan apapun itu dan kebetulan objek wisata ini di alokasikan ke dana desa maka dari itu masyarakat hanya sebagian yang memberikan partisipasi uang atau materi ini jadi untuk partisipasi uang ini terfokuskan ke Pemerintahan desa dalam mengelolanya. Tanggapan masyarakat mengenai untuk diharapkan memberikan partisipasi uang ini banyak keragamannya dimana itu dipengaruhi faktor ekonomi, sosial, dan kebiasaan setiap masyarakat, karena masyarakat Durian Demang memiliki latar belakang pendidikan dan ekonomi yang berbeda-beda”

Wawancara selanjutnya dengan ibu Sisti Eka Putri selaku kaur pelayanan wawancara pada hari Selasa 15 Agustus 2023, beliau menjelaskan:

“Masyarakat Yang Memberikan partisipasi berupa uang itu ada contohnya seperti keluarga saya dan sanak family yang lain di sekitaran rumah saya, ketika ada uang atau rezeki lebih, kami sempatkan memberikan bantuan materi kepada masyarakat saat melakukan kegiatan yang bersangkutan dengan progres pengembangan dan pemeliharaan objek wisata. Partisipasi masyarakat dalam hal materi atau uang ini sangat berpengaruh demi kelancaran dimana disisi lain dapat menambah anggaran untuk menopang anggaran dari dana desa, bukan kah semakin banyak maka semakin bagus dan kegiatan berjalan dengan baik. Tanggapan masyarakat mengenai masalah untuk di harapkan memberikan partisipasi materi atau uang ini dari yang saya lihat selama ini masih tergolong berat, berat dalam artian merasa terbebani karena penghasilan yang hanya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk biaya yang lain, maka dari itu untuk meminta masyarakat memberikan partisipasi materi atau uang tidak dapat di lakukan dengan cara permintaan atau mengharapakan.”

Wawancara selanjutnya dengan saudara Saresta Robianto selaku ketua Karang Taruna Desa Durian Demang wawancara pada hari Jumat 18 Agustus 2023, beliau menjelaskan:

“Partisipasi masyarakat dalam memberikan uang atau materi ini ada, namun hanya sebagian dan itu sukarela yang dilakukan oleh masyarakat kami anggota karang taruna pernah meminta sukarela dari masyarakat untuk memberikan partisipasi dalam bentuk materi atau uang untuk melakukan kegiatan bersih-bersih di area objek wisata Bukit Kandis untuk biaya operasional dan konsumsi seperti air minum dan snack-snack. Partisipasi materi sangat di perlukan karena itu bias memperlancar kegiatan dan dapat menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan perawatan objek wisata Bukit Kandis. Tanggapan masyarakat saat diharapkan untuk memberikan partisipasi uang atau materi masih sangat rendah dikarenakan faktor ekonomi dan faktor sosial yang kurang memadai.”

Wawancara selanjutnya dengan ibu Mardianti selaku masyarakat desa Durian Demang yang tinggal di dalam gang objek wisata Bukit Kandis wawancara pada hari Jumat 18 Agustus 2023, beliau menjelaskan:

“saya selaku masyarakat pernah berpartisipasi dalam memberikan uang atau materi kepada anggota Karang Taruna yang hendak melakukan kegiatan bersih-bersih di area bukit kandis karena tidak bisa berpartisipasi tenaga dalam melakukan kegiatan itu maka paling tidak sudah memberikan partisipasi bantuan berupa uang atau materi untuk menambah biaya operasional yang di berikan dari pemerintah desa. Partisipasi uang atau materi ini sangat di perlukan karena dapat menunjang kegiatan agar

berjalan dengan lancar. Pemerintah desa yang diwakili anggota karang taruna merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan partisipasi uang atau materi dari masyarakat.”

Wawancara selanjutnya dengan ibu Nuddiah selaku masyarakat desa Durian Demang wawancara pada hari Jumat 18 Agustus 2023, beliau menjelaskan:

“Untuk berpartisipasi dalam memberikan uang atau materi saya masih kurang dalam hal itu dikarenakan faktor ekonomi yang kurang memadai. Partisipasi materi atau uang ini sangat di perlukan karena dapat memberikan kelancaran pada kegiatan pemeliharaan objek wisata Bukit Kandis dan juga membantu menambah biaya operasional yang ada.”

Wawancara selanjutnya dengan bapak Fauzan selaku masyarakat desa Durian Demang wawancara pada hari Minggu 20 Agustus 2023, beliau menjelaskan:

“Berpartisipasi dalam memberikan uang atau materi pernah saya lakukan karena sibuk dengan pekerjaan sehingga tidak dapat memberikan partisipasi tenaga maka dari itu paling tidak saya sudah memberikan partisipasi dalam bentuk materi atau uang. partisipasi uang atau materi ini sangat di perlukan karena uang atau materi sangat berpengaruh demi kelancaran kegiatan pemeliharaan objek wisata Bukit Kandis dan juga dapat mendorong partisipasi dari masyarakat lain untuk ikut dalam kegiatan pemeliharaan objek wisata Bukit Kandis. Pemerintah merasa diringankan dengan adanya partisipasi dari masyarakat.”

Dari hasil wawancara keenam informan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat desa Durian Demang dalam memberikan partisipasi uang atau materi hanya sebagian masyarakat dikarenakan faktor ekonomi yang kurang mendukung sehingga yang biasa memberikan partisipasi uang atau materi hanya dari masyarakat yang memiliki standard ekonomi menengah ke atas

Partisipasi Tenaga

Dalam aspek ini yang di berikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan dalam satu program. Berikut adalah hasil wawancara dengan bapak Thomas Edison Selaku Kepala desa Durian Demang wawancara pada hari Selasa 15 Agustus 2023, beliau menjelaskan:

“Partisipasi tenaga juga sangat penting dalam pemeliharaan objek wisata Bukit Kandis karena tanpa ada partisipasi tenaga dari masyarakat lantas apa yang akan tergerakkan untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan objek wisata Bukit Kandis. Respon masyarakat ketika di ajak bergotong royong ada yang sangat antusias dan ada yang biasa-biasa saja, dan juga ada yang tidak menghiraukan sama sekali, mungkin dikarenakan faktor sosial dan faktor kesibukan pribadi masing-masing setiap masyarakat. Yang biasa terlibat dalam kegiatan gotong royong yang paling sering itu anggota Karang Taruna, dan masyarakat yang tidak atau belum memiliki kesibukan pada saat kegiatan berlangsung.”

Wawancara selanjutnya dengan ibu Sisti Eka Putri selaku kaur pelayanan desa Durian Demang wawancara dilakukan pada hari Selasa 15 Agustus 2023, beliau menjelaskan:

“Partisipasi tenaga itu sangat penting bahkan bisa menjadi faktor utama untuk terlaksanakannya suatu kegiatan seperti kegiatan pemeliharaan objek wisata Bukit Kandis karena tanpa ada bantuan tenaga dari masyarakat mana bisa terlaksana dengan sempurna suatu kegiatan dan bisa saja tidak akan terlaksana bila tidak ada partisipasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam suatu kegiatan yang akan dilaksanakan. Masyarakat Durian Demang tergolong masyarakat yang berjiwa sosial tinggi jadi apabila akan diadakan gotong royong dalam upaya pemeliharaan objek wisata Bukit Kandis masyarakat dengan sungkan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, kecuali masyarakat yang sibuk dengan pekerjaannya dan sibuk dengan urusan pribadinya. yang terlibat pada saat gotong royong biasanya anggota Karang taruna dan masyarakat di sekitaran atau yang dekat dengan objek wisata Bukit Kandis, dulu sebelum menjadi anggota dari pemerintah desa saya pernah bergabung dengan anggota Karang taruna dan ikun berpartisipasi dalam kegiatan seperti gotong royong ini.”

Wawancara selanjutnya dengan saudara saresta robianto selaku ketua Karang Taruna Desa Durian Demang wawancara pada hari Jumat 18 Agustus 2023, beliau menjelaskan:

“Partisipasi tenaga sangat penting karena bantuan tenaga adalah hal yang paling penting dalam menopang terlaksanakannya kegiatan terutama untuk melakukan kegiatan pemeliharaan objek wisata Bukit Kandis, karena membutuhkan partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga agar kegiatan tersebut terlaksanakan dengan maksimal. respon masyarakat ketika di ajak bergotong royong sangat antusias tetapi disesuaikan dengan keadaan, karena masyarakat memiliki kesibukan pekerjaan masing-masing kecuali beberapa masyarakat yang sedang menganggur atau belum berkerja dan memiliki waktu luang. yang selalu ikut berpartisipasi pada saat gotong royong di laksanakan itu biasanya anggota Karang Taruna dan masyarakat yang tinggal tidak jauh dari objek wisata Bukit Kandis.”

Wawancara selanjutnya dengan ibu Mardianti selaku masyarakat desa Durian Demang yang tinggal di dalam gang objek wisata Bukit Kandis wawancara pada hari Jumat 18 Agustus 2023, beliau menjelaskan:

“Memberikan bantuan berupa tenaga ini sangat penting untuk terlaksanakannya kegiatan pemeliharaan objek wisata Bukit Kandis, namun saya sendiri kadang masih jarang berpartisipasi memberikan bantuan tenaga pada saat kegiatan pemeliharaan objek wisata Bukit Kandis karena ada kesibukan di sawah. apabila sedang tidak ada kesibukan saya senantiasa menerima ajakan untuk bergotong royong dalam upaya pemeliharaan objek wisata Bukit Kandis. Masyarakat yang dekat dengan objek wisata bukit kandis, masyarakat yang sedang tidak ada kesibukan, dan anggota Karang taruna mewakili pemerintah desa.”

Wawancara selanjutnya dengan ibu Nuddiah selaku masyarakat desa Durian Demang wawancara pada hari Jumat 18 Agustus 2023, beliau menjelaskan:

“partisipasi tenaga ini sangat perlu demi kelancaran dan terlaksananya kegiatan pemeliharaan objek wisata Bukit Kandis. karena dengan memberikan partisipasi tenaga saya bisa memberikan bantuan dan dapat meringankan pekerjaan dalam memelihara objek wisata bukit kandis. Dengan senang hati karena saya merasa jika tidak bisa

memberikan partisipasi uang atau materi saya sudah berpartisipasi tenaga dengan membantu dalam hal gotong royong. Yang berpartisipasi saat gotong royong yaitu masyarakat desa Durian Demang yang sedang tidak ada kesibukan dan anggota Karang Taruna yang menjadi penggerak utama yang mewakili pemerintah desa Durian Demang.”

Wawancara selanjutnya dengan bapak Fauzan selaku masyarakat desa Durian Demang wawancara pada hari Minggu 20 Agustus 2023, beliau menjelaskan:

“Partisipasi tenaga itu sangat dibutuhkan dalam upaya pemeliharaan objek Wisata Bukit kandis, karena dalam proses itu membutuhkan tenaga yang ekstra agar dapat berjalan dengan lancar. karena ada kesibukan dengan pekerjaan seringkali saya menunda atau menolak ajakan gotong royong dan menjelaskan alasan mengapa tidak bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Yang biasa terlibat pada saat gotong royong itu biasanya anggota karang taruna dan masyarakat yang tidak jauh dari objek wisata Bukit Kandis.”

Dari hasil wawancara keenam informan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa Durian Demang yang memberikan partisipasi tenaga dalam upaya pemeliharaan objek wisata Bukit Kandis lebih cenderung dilakukan oleh masyarakat yang ruamahnya tidak jauh dari lokasi Objek wisata Bukit Kandis dan masyarakat yang memiliki rasa sungkan karena tidak dapat memberikan partisipasi yang lain selain berpartisipasi dalam tenaga.

Partisipasi Pikiran-Pikiran Atau Ide-Ide

Dalam aspek ini berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program mauoun untuk memperlancar pelaksanaan dan juga untuk mewujudkannya dengan memberi pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikuti. Berikut adalah hasil wawancara dengan bapak Thomas Edison Selaku Kepala desa Durian Demang wawancara pada hari Selasa 15 Agustus 2023, beliau menjelaskan:

“Meminta masyarakat untuk menyumbangkan ide mengenai pemeliharaan objek wisata Bukit Kandis pernah saya lakukan sebelum melaksanakan kegiatan tersebut, karena meminta ide atau masukan dari masyarakat itu perlu terutama meminta ide-ide dari tokoh masyarakat untuk menentukan hal apa yang akan dilakukan saat pelaksanaan kegiatan dan bagaimana susunan dan pembagian teknis pengerjaannya agar bisa berjalan dengan baik, Partisipasi ide ini juga di perlukan agar adanya keselarasan dalam penentuan atau pembagian teknis pengerjaannya, dimana masyarakat juga ikut menentukan agar tidak ada kesalah pahaman saat pelaksanaan pemeliharaan objek Wisata Bukit Kandis nanti. Hanya beberapa masyarakat yang memeberikan masukan pikiran-pikiran atau ide-ide , mungkin dikarenakan sebagiannya lagi hanya mengikuti apa saja instruksi yang akan terjadi nanti. ide masyarakat di butuhkan pada saat sebelum melakukan kegiatan pemeliharaan objek wisata Bukit Kandis agar dapat dikumpulkan dan disatukan menjadi satu pemikiran yang mutlak.”

Wawancara selanjutnya dengan ibu Sisti Eka Putri selaku Kaur pelayana desa Durian Demang wawancara pada hari Selasa 15 Agustus 2023, beliau menjelaskan:

“Meminta masyarakat untuk memberikan masukan ide-ide mengenai pemeliharaan objek wisata Bukit Kandis pernah saya lakukan agar pelaksanaan pemeliharaan tersusun sesuai rencana. partisipasi pemberian ide-ide ini berpengaruh pada pengambilan keputusan bersama untuk melakukan kegiatan pemeliharaan objek wisata Bukit Kandis. Masyarakat memeberikan masukan ide-ide biasanya saat persiapan sebelum melakukan kegiatan pemeliharaan objek wisata Bukit Kandis di sela-sela obrolan saat berkumpul sebelum pelaksanaan. Ide masyarakat di butuhkan setiap saat untuk di kumpulkan dan di pertimbangkan agar menjadi sebuah pokok pemikiran yang akan dilakukan saat pelaksanaan pemeliharaan objek wisata nantinya.”

Wawancara selanjutnya dengan saudara Saresta Robianto selaku ketua Karang Taruna desa Durian Demang wawancara pada hari Jumat 18 Agustus 2023, beliau menyatakan:

“Selaku ketua karang taruna biasanya saya meminta ide dari anggota terlebih dahulu lalu menggabungkannya dengan ide-ide dari masyarakat. Partisipasi ide-ide ini juga berpengaruh agar tidak ada berselisih paham dan adanya masukan dari setiap pemikiran untuk dijadikan landasan pada saat pelaksanaan kegiatan. Partisipasi masyarakat saat menyumbangkan ide-ide ini biasanya hanya dilakukan beberapa masyarakat yang memiliki pendapat tersendiri yang menurutnya berpengaruh pada pelaksanaan dan sebagiannya lagi hanya mengikuti alur yang akan dilaksanakan nantinya. Ide masyarakat di butuhkan setiap saat agar bisa dikumpulkan dan di jadikan satu pemikiran untuk dilaksanakan saat pemeliharaan objek wisata Bukit Kandis dilakukan.”

Wawancara selanjutnya dengan ibu Mardianti selaku masyarakat desa Durian Demang yang tinggal di dalam gang objek wisata Bukit Kandis wawancara pada hari Jumat 18 Agustus 2023, beliau menjelaskan:

“Pernah tetapi tidak terlalu sering hanya beberapa kali saja. Ide yang saya berikan seperti pengarahan anggota karang taruna agar bisa mengajak masyarakat yang lain untuk berpartisipasi. saya memberikan ide pada saat ingin memberikan partisipasi berupa uang atau materi.”

Wawancara selanjutnya dengan ibu Nuddiah selaku masyarakat desa Durian Demang wawancara pada hari Jumat 18 Agustus 2023, beliau menjelaskan:

“Ya, pernah saya pernah menyumbnagkan ide atau pikiran-pikiran untuk upaya pemeliharaan objek wisata Bukit Kandis yang menurut saya akan lebih efektif nantinya. Ide yang saya berikan berupa menyarankan bagian-bagian yang mana terlebih dahulu harus dikerjakan dan pembagian kelompok untuk pengerjaannya. Saya memberikan ide tersebut pada saat sebelum pelaksanaan kegiatan.”

Wawancara selanjutnya dengan bapak Fauzan selaku masyarakat desa Durian Demang wawancara pada hari Minggu 20 Agustus 2023, beliau menjelaskan:

“Saya tidak pernah memberikan partisipasi ide-ide atau pikiran dikarenakan saya jarang untuk mengikuti kegiatan upaya pemeliharaan objek wisata Bukit Kandis karena kesibukan dan tuntutan pekerjaan, jadi saya hanya mengikuti apa saja yang akan dilakukan dan memberikan partisipasi berupa uang atau materi demi kelancaran kegiatan tersebut.”

Dari hasil wawancara keenam informan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang berpartisipasi dalam memberikan ide-ide atau pikiran-pikiran hanya dilakukan masyarakat yang biasa berpartisipasi dalam bantuan tenaga dan masyarakat yang memiliki kedudukan atau tokoh masyarakat yang menjadi tetua demi menghormati dan menghargai tokoh masyarakat itu dengan pertimbangan dari seluruh masyarakat yang juga memberikan ide-ide atau pikiran-pikiran.

Dokumentasi

Adapun dokumentasi yang telah di peroleh peneliti selama penelitian sebagai berikut

Tabel 4.6

Indikator Dan Pedoman Wawancara

No	Indikator	Wawancara Pemerintah	Wawancara Masyarakat
1	Partisipasi Uang	-Apakah ada masyarakat yang memberikan partisipasi materi dalam rangka mendukung pemeliharaan objekwisata Bukit Kandis? -Mengapa partisipasi uang diperlukan -bagaimana tanggapan masyarakat jika diharapkan memberikan partisipasi uang?	-Apakah ada bapak/ibu pernah memberikan partisipasi uang dalam rangka pemeliharaan objek wisata Bukit Kandis -Menurut bapak/ibu mengapa partisipasi uang diperlukan? -Bagaimana tanggapan pemerintah pada saat bapak/ibu memberikan partisipasi berupa uang atau materi?
2	Partisipasi Tenaga	-Mengapa partisipasi tenaga penting dalam pemeliharaan wisata Bukit Kandis? -Bagaimana respon masyarakat jika di ajak bergotong royong? -Siapa saja yang terlibat pada saat gotong royong dilaksanak	-Mengapa bapak/ibu perlu memberikan partisipasi tenaga dalam pemeliharaan wisata Bukit Kandis? -Bagaimana Respon bapak/ibu jika diajak bergotong royong? -Siapa saja yang terlibat saat gotong royong?
	Partisipasi Pikiran-Pikiran Atau Ide-Ide	-Apakah bapak /ibu pernah meminta masyarakat untuk menyumbangkan ide mengenai pemeliharaan objek wisata Bukit Kandis? -Seberapa penting partisipasi ide atau pikiran menurut bapak/ibu? -Pada saat kondisi apa ide masyarakat dibutuhkan?	-Apakah bapak/ibu pernah menyumbangkan ide untuk pemeliharaan objek wisata Bukit Kandis? -Seperti apa ide yang bapak/ibu berikan mengenai pemeliharaan objek wisata Bukit Kandis? -Kapan bapak/ibu memberikan ide tersebut?

PEMBAHASAN

Pada bagian ini peneliti akan menyajikan berbagai informasi yang di dapat dari hasil penelitian. Kemudian data yang didapat dianalisis oleh peneliti mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Pemeliharaan Objek Wisata Bukit Kandis Desa Durian Demang Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada dan dapat menyajikan tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui Bagaimana minat dan tanggap masyarakat desa Durian Demang berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan objek wisata Bukit Kandis dan faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam upaya pemeliharaan objek wisata Bukit Kandis. Aspek penelitian ini diadopsi dari teori menurut Wisnu Hidayat dimana partisipasi masyarakat dapat di lihat dalam bentuk Uang, Tenaga, dan Pikiran-pikiran atau Ide-Ide. dimulai dari:

Partisipasi Uang

Partisipasi ini untuk kelancaran usaha-usahabagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan. Pada indikator ini, dimensi yang dilihat yaitu bagaimana respon masyarakat jika pemerintah mengharapkan masyarakat untuk berpartisipasi materi atau uang dan faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam upaya pemeliharaan objek wisata Bukit Kandis. Respon masyarakat akan hal itu beragam, ada yang memberikan secara sukarela dan ada yang memberikan karena sungkan, itu semua dikarenakan adanya faktor yang mempengaruhi partisipasi tersebut, faktor yang utama yaitu faktor ekonomi dimana sumber penghasilan utama separuh masyarakat desa Durian Demang berasal dari sektor pertanian dan perternakan berdasarkan dari data yang di dapat dari RPJM Desa.

Tabel 4.7

Sumber Penghasilan Utama Penduduk

No	Sumber Penghasilan Penduduk	Jumlah	Satuan
1	Petani, Perikanan Dan Perkebunan	680	Orang
2	Penggalian dan Pertambangan	20	Orang
3	Perdagangan Kecil/ Eceran Dan Rumah Makan	45	Orang

Sumber: RPJM Desa 2017-2023

Partisipasi Tenaga

Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang di berikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program. Pada indikator ini dimensi yang dilihat adalah siapa saja yang sering terlibat dalam memberikan partisipasi tenaga pada kegiatan pemeliharaan objek wisata Bukit Kandis. Pada partisipasi tenaga yang dilakukan masyarakat desa Durian Demang lebih dominan diwakili oleh anggota Karang Taruna desa Durian Demang dan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam memberikan tenaga ini yaitu kesibukan pribadi masyarakat dan tuntutan pekerjaan yang mengharuskan masyarakat terfokuskan terhadap pekerjaannya itu.

Partisipasi Pikiran-Pikiran Atau Ide-Ide

Partisipasi pikiran merupakan partisipasi berupa ide, pendapat, atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang di ikuti. Pada indikator ini, dimensi yang dilihat yaitu seberapa penting partisipasi ide ini terhadap upaya perawatan objek wisata Bukit Kandis dan kelompok masyarakat mana yang dibutuhkan idenya. Masyarakat desa Durian Demang memberikan tanggapan terhadap partisipasi ide demi kelancaran upaya pemeliharaan objek wisata Bukit Kandis kepada pemerintah desa pada saat sedang berkumpul dalam keadaan nonformal di luar forum diskusi atau musyawarah dan demi menghargai tokoh-tokoh tetua desa pemerintah mendahulukan pendapat atau ide-ide dari tokoh tersebut dan menggabungkannya dengan pendapat dari masyarakat yang lain untuk menghasilkan satu pikiran utama yang akan di gunakan ketika pelaksanaan kegiatan pemeliharaan objek wisata Bukit Kandis nantinya.

PENUTUP

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh peneliti dan kemudian di bahas dalam pembahasan yang sumberannya dari hasil penelitian berdasarkan aspek dari Wisnu Hidayat yaitu sebagai berikut:

1. Dari aspek partisipasi uang dengan dimensi yang dilihat yaitu bagaimana respon masyarakat jika pemerintah mengharapkan masyarakat untuk berpartisipasi materi atau uang dan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam upaya pemeliharaan objek wisata Bukit Kandis. Partisipasinya sudah baik namun belum dilakukan menyeluruh oleh masyarakat desa Durian Demang dan faktor utama yang mempengaruhinya yaitu faktor ekonomi dimana sebagian masyarakat Durian Demang hanya mengandalkan penghasilan dari sector pertanian dan perternakan yang masih dalam tingkatan menengah ke bawah, sehingga partisipasi uang ini terhambat untuk dilakukan oleh sebagian masyarakat.
2. Dari aspek partisipasi tenaga dengan dimensi yang dilihat adalah siapa saja yang sering terlibat dalam memberikan partisipasi tenaga pada kegiatan pemeliharaan objek wisata Bukit Kandis. partisipasi ini lebih dominan dilakukan oleh anggota karang taruna desa Durian Demang dan masyarakat yang berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan objek wisata Bukit Kandis hanya masyarakat yang memiliki waktu Luang pada saat kegiatan berlangsung, dari wawancara yang telah dilakukan masyarakat menggantikan partisipasi tenaga ini dengan partisipasi uang demi menjaga kesungkunan kepada masyarakat yang berpartisipasi tenaga tersebut.
3. Dari aspek partisipasi pikiran-pikiran atau ide-ide dengan dimensi yang dilihat yaitu seberapa penting partisipasi ide ini terhadap upaya perawatan objek wisata Bukit Kandis dan kelompok masyarakat mana yang dibutuhkan idenya. Partisipasi ide ini juga berpengaruh pada kelancaran kegiatan pemeliharaan objek wisata Bukit Kandis, masyarakat Durian Demang memberikan partisipasi ide ini di sela sela pembicaraan atau sedang dalam perkumpulan yang bersifat non formal dan pemerintah mendahulukan pendapat dari tetua desa Durian Demang demi menghormati sebagai tokoh terkemuka di desa Durian Demang dan menggabungkan keseluruhan pendapat nantinya.

Dari uraian kesimpulan dalam penelitian ini sehingga saran yang dapat di berikan sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah desa untuk mensosialisasikan kepada masyarakat Desa Durian Demang tentang betapa pentingnya atau betapa berpengaruhnya partisipasi masyarakat dalam upaya pemeliharaan objek wisata Bukit Kandis desa Durian Demang kecamatan Karang Tinggi kabupaten Bnengkulu Tengah.
2. Masyarakat harus peka terhadap peningkatan perawatan objek wisata Bukit Kandis karena masyarakat lah yang akan menerima dampak dari kemajuan objek wisata Bukit Kandis.
3. Harus menjalin hubungan yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat agar program yang di jalan kan akan terlaksanakan dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL:

- Purnama, A. O. D. A. A. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata bahari Pulau Kapoposang Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan. *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research*, 3(2), 113-126.
- NIM, S. N. (2016). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMELIHARAAN DAN PEMANFAATAN OBJEK WISATA AIR PAOH DI DESA PANGKALAN BUTON KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN KAYONG UTARA. *SOCIODEV, Jurnal Ilmu Sosiatri (Pemsos)*, 5(3).
- Rismayanti, P. R. (2020). *Identifikasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata di Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha).
- Hutagalung, S. S., & Hermawan, D. (2021). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Objek Wisata Di Lampung Selatan. *Sosiohumaniora*, 23(1), 124-132.
- Firmando, H. B. (2021). PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT SADAR WISATA DAN PEDULI LINGKUNGAN DI DESA DOLOK NAULI KECAMATAN ADIAN KOTING KABUPATEN TAPANULI UTARA. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 1(3), 112-123.

KARYA LAIN:

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2017-2023

WEBSITE:

BPK RI Peraturan Perundang-undangan tentang Pariwisata, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38598/uu-no-10-tahun-2009#:~:text=UU%20No.%209%20Tahun%201990%20tentang%20Kepariwisataan>
Website Desa Durian Demang, <https://duriandemang.desa.id/>